

**Implementasi Kerja Sama Indonesia – Jepang dalam
Bidang Ketenagakerjaan melalui *Indonesia – Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA)***



SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh:
DWI SANDY PRIYO WICAKSONO
E061191104

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG
DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN MELALUI
INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JEPA)

N A M A : DWI SANDY PRIYO WICAKSONO

N I M : E061191104

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 6 Mei 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Imran Hanafi, MA, M.Ec
NIP. 196307041988031001

Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG
DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN MELALUI
INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

N A M A : DWI SANDY PRIYO WICAKSONO

N I M : E061191104

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 30 April 2024.



Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, MA, M.Ec

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Dwi Sandy Priyo Wicaksono

NIM : E061191104

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**"IMPLEMENTASI KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA –
JEPANG MELALUI *INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT*"**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi itu merupakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Mei 2024



Dwi Sandy Priyo Wicaksono

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian kali ini yang berjudul **“Implementasi Kerja Sama Ketenagakerjaan Indonesia – Jepang melalui Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tak luput juga salam dan shalawat saya panjatkan keada Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi’wasallam, yang telah membawa kita semua dari masa kegelapan ke masa kejayaan.

Sebuah perjalanan penelitian yang menarik dan bermakna telah saya jalani dalam menyusun skripsi ini tentang implementasi kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Penelitian ini menjadi sebuah upaya untuk mendalami dampak dan efektivitas perjanjian ekonomi antara kedua negara dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam kata pengantar ini, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada:

1. **Bapak saya, Sugianto**, yang selalu memberi dukungan dan mendoakan saya demi kelancaran dan kemudahan segala urusan saya selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Begitu juga dengan **ibu saya, Andi Mardiaty** yang selalu menjadi *supporter* yang selalu memberi semangat serta yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah saat menghadapi proses perkuliahan hingga saat ini.
2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kepala departemen dari prodi Ilmu Hubungan Internasional, **bapak Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D** yang telah membantu dan memberi kemudahan kepada saya dalam menyelesaikan proses penelitian skripsi ini mulai dari memasukkan judul hingga pemberkasan akhir.
3. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam untuk kedua dosen pembimbing saya yaitu bapak **Drs. Muhammad Imran Hanafi, MA.,M.Ec.** dan kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., M.A.**. Tanpa adanya bantuan serta kesabaran dari kedua dosen pembimbing saya ini maka proses penelitian kali ini tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak.
4. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen atau tenaga pengajar di fakultas Sospol, khususnya di prodi Ilmu Hubungan Internasional serta kepada para *staff* yang telah membantu saya dalam menyelesaikan berkas penelitian.
5. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, baik itu teman seangkatan maupun dari beda angkatan. Teman saya yang sejurusan maupun yang beda jurusan. Terima kasih karena telah membantu saya dalam menghadapi perkuliahan dan akhirnya dapat menyelesaikannya.

6. Terima kasih buat pacar dan calon istri saya, **Gita Sekar Andini** yang telah menjadi penyemangat dan selalu ada dalam setiap proses yang saya lewati terlebih selama penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga saya sampaikan untuk grup sanggar tari ibukota, **JKT48** beserta seluruh member yang ada, karena berkat lagu-lagu dari mereka, proses penelitian ini bisa terasa sedikit menyenangkan dan jinzo faiya faiba waipa.

ABSTRAK

Dwi Sandy Priyo Wicaksono, E061191104, “Implementasi Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Bidang Ketenagakerjaan melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)”, di bawah bimbingan M. Imran Hanafi, MA., M.Ec. selaku Pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk implementasi kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang ketenagakerjaan melalui IJEPA dan apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjelaskan bentuk implementasi kerja sama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang ketenagakerjaan melalui IJEPA dan apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik library research, dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, penelitian sebelumnya, halaman web, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik analisis kualitatif untuk kemudian menghasilkan narasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk implementasi kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang ini dapat berupa adanya pengiriman tenaga kesehatan asal Indonesia ke Jepang pada tahun 2008. Terdapat juga lembaga-lembaga pelatihan untuk calon tenaga kerja yang dibentuk atas dasar kerja sama kedua negara. Pengiriman pemegang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di Jepang. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengimplementasian kerja sama ini adalah keterbatasan kemampuan baik dari segi bahasa maupun keahlian kerja bagi sebagian besar SDM Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya calon perawat asal Indonesia yang bisa lulus melewati ujian nasional perawat di Jepang. Durasi program pelatihan yang lebih singkat dibanding negara lain juga menyebabkan adanya jarak kemampuan dari *trainee* asal Indonesia dengan *trainee* dari negara lain. Tidak siapnya *trainee* asal Indonesia juga dibuktikan dengan adanya kasus pemegang yang melarikan diri dari perusahaan tempat mereka magang. Adanya juga praktik korupsi dalam proses administrasi program pemagangan serta kekerasan terhadap tenaga kerja asal Indonesia juga masih menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia.

Kata kunci: Indonesia, Jepang, kerja sama ketenagakerjaan, IJEPA, pengiriman tenaga kesehatan, pengiriman *trainee*.

ABSTRACT

Dwi Sandy Priyo Wicaksono, E061191104, "Implementation of Indonesia-Japan Cooperation in the Field of Manpower through the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)," under the supervision of M. Imran Hanafi, MA., M.Ec. as Supervisor I and Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. as Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to examine the forms of implementation of cooperation between Indonesia and Japan in the field of manpower through IJEPA and the challenges faced by the Indonesian government in implementing this cooperation. Using a qualitative method, this study explains the forms of cooperation between Indonesia and Japan in the field of manpower through IJEPA and the challenges faced by the Indonesian government in implementing this cooperation. In obtaining the necessary data, this research uses the library research technique, conducted by examining various references relevant to the research topic, such as books, scientific journal articles, official documents, previous research, web pages, and other sources related to the research topic. The collected data are then processed using qualitative analysis techniques to produce narratives that answer the research questions.

The results of this research indicate that the forms of implementation of manpower cooperation between Indonesia and Japan can include the sending of Indonesian healthcare workers to Japan in 2008. There are also training institutions for prospective workers established based on the cooperation of the two countries. The Indonesian government also sends interns to meet the demand for labor in Japan. The challenges faced by Indonesia in implementing this cooperation include limitations in both language skills and job skills for most Indonesian human resources. This can be seen from the low number of Indonesian nursing candidates who pass the national nursing exam in Japan. The shorter duration of training programs compared to other countries also creates a gap in skills between trainees from Indonesia and those from other countries. The unpreparedness of Indonesian trainees is also evidenced by cases of interns running away from the companies where they interned. The presence of corruption practices in the administration process of internship programs and violence against Indonesian workers also remain significant obstacles for Indonesia.

Keywords: *Indonesia, Japan, manpower cooperation, IJEPA, sending healthcare workers, sending trainees.*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konsep Kerja Sama Bilateral.....	22
B. Konsep Kerja Sama Ekonomi.....	30
C. Konsep Mobilitas Tenaga Kerja	39
D. Penelitian Terdahulu	45
BAB III GAMBARAN UMUM	50
A. Dinamika Kerja Sama Indonesia dengan Jepang	50
B. Dinamika Perkembangan Perekonomian dan Penyebab Meningkatnya Kebutuhan Tenaga Kerja Asing di Jepang	59
C. Dasar Kerja Sama IJEPA.....	67
BAB IV ANALISIS.....	77
A. Implementasi Kerja Sama Ketenagakerjaan Indonesia-Jepang melalui <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i> Periode 2008-2023	77
B. Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Menjalankan Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Jepang melalui IJEPA.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara merupakan salah satu isu yang paling sering dibahas dalam studi hubungan internasional. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi arus dan tata cara suatu negara dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Perkembangan teknologi menyebabkan perekonomian dunia semakin terintegrasi karena semakin mudahnya terjadi arus perpindahan informasi serta barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya. Kemudahan inilah yang membuat persaingan antar negara dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya semakin ketat. Oleh karena itu banyak negara yang terus memperkuat dan memperbaharui strategi agar dapat bersaing dalam pasar internasional (Jesica dan Kurnia, 2019).

Perdagangan internasional telah menjadi dasar dari berkembangnya perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kegiatan perdagangan internasional sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 adalah “Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu ekspor dan impor, “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari

daerah pabean” menurut UU No. 17 tahun 2006 pasal 1 ayat 14. Pada pasal yang sama dalam ayat 13 “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”.

Adapun tujuan dari dilakukannya perdagangan Internasional ialah untuk memenuhi kebutuhan dari negara. Namun kenyataannya melakukan perdagangan ini masih terasa cukup sulit untuk beberapa negara karena terdapat beberapa hal yang dirasa menjadi hambatan seperti adanya tarif pajak dan bea yang tinggi untuk barang-barang lintas batas serta adanya pengaturan kuota impor. (Wati, dkk. 2023)

Melihat adanya hambatan-hambatan tersebut, negara di dunia pun memilih untuk menjalankan sistem perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA). Adapun perjanjian FTA ini dilakukan oleh negara yang saling bermitra dengan tujuan untuk mengatur kerja sama perdagangan serta menghapus segala hambatan dalam melakukan perdagangan. Adanya perdagangan bebas juga dapat meningkatkan kerja sama Internasional karena perdagangan ini mengharuskan negara untuk menjalankan kemitraan dagang dengan negara lain. Negara yang bermitra akan memberi kemudahan serta mempromosikan keunggulan yang dimiliki oleh negara mitranya. Kegiatan ini pun dapat disebut sebagai integrasi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara agresif menjalankan diplomasi dan mengadopsi sistem perdagangan yang berwawasan pada tren Internasional dengan ikut melakukan perjanjian perdagangan bebas. Indonesia menjalin kemitraan ekonomi perdagangan bebas dengan Jepang melalui *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Perjanjian ini disahkan oleh kedua kepala negara pada 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2008. Diharapkan dengan adanya perjanjian ini maka dapat terjalin kerja sama yang semakin erat dan saling menguntungkan kedua negara.

Indonesia sendiri telah melakukan perjanjian perdagangan bebas sebanyak 5 kali selain dengan Jepang. Pada tahun 2002, Indonesia meratifikasi pembentukan FTA bersama dengan negara-negara anggota ASEAN atau disingkat dengan ASEAN – FTA (AFTA). Dalam perkembangannya, AFTA kemudian melakukan pembentukan forum FTA dengan China (ACFTA) pada tahun 2004, Korea (AKFTA) pada tahun 2007, India (AIFTA) pada tahun 2010, serta Australia dan New Zealand (AANZFTA) pada tahun 2010 (Sitepu dan Nurhidayat, 2015).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan negara mengalami perubahan dan tidak lagi hanya berpusat pada isu ekonomi. Terdapat beberapa isu interdependensi yang lebih kompleks seperti permasalahan lingkungan, kesehatan, dan populasi atau demografi. Hal

inilah yang membuat Keohane dan Nye memperkenalkan istilah “interdependensi kompleks” (Sterling-Folker, 2013).

Berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas yang pernah dilakukan Indonesia sebelumnya, IJEPA sendiri memiliki sifat yang lebih kompleks karena tidak hanya berfokus pada perdagangan barang, perjanjian ini juga mencakup berbagai bidang kerja sama lainnya seperti peningkatan investasi, perdagangan jasa, pemberian fasilitas perdagangan dan promosi serta perlindungan dan fasilitasi perpindahan perseorangan. Dimana dengan adanya hubungan ini maka kedua negara sama-sama mendapat keuntungan berupa kemudahan untuk meningkatkan kualitas perekonomian serta memanfaatkan sumber daya yang masing-masing dimiliki. (Nashrullah, 2021)

Jalinan kerja sama ekonomi antar dua negara ini dianggap merupakan suatu hubungan yang saling melengkapi, dimana Jepang dengan sumber daya manusia dan teknologi yang lebih berkembang akan menjadi negara produsen yang akan mengekspor barang hasil produksinya. Sedangkan Indonesia yang memiliki keunggulan dalam segi sumber daya alamnya akan menjadi negara eksportir bahan-bahan mentah yang nantinya akan digunakan oleh Jepang untuk kembali memproduksi produk-produk yang akan diekspor kembali. (Avivi dan Siagian, 2020).

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dampak dari kerja sama ekonomi Indonesia – Jepang atau IJEPA ini, seperti penelitian yang berjudul “Dampak Penerapan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Terhadap Nilai Ekspor Impor Indonesia” oleh Jessica dan Akhmad Syakir Kurnia (2019), lalu ada “Pengaruh Perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Terhadap Pangsa Pasar Produk Indonesia Di Jepang oleh Annisa Eka Wati dkk (2023) serta Pengaruh Inflasi, Kurs Dolar As, Dan Ijepa Terhadap Ekspor Tekstil Pakaian. Jadi Indonesia Ke Jepang oleh Ni Made Dwi Rismayanti dan Nyoman Djinar Setiawina.

Namun dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bagaimana penulis sebelumnya lebih berfokus pada dampak IJEPA dalam proses perdagangan barang atau *trading goods*, sedangkan seperti yang sudah dijelaskan bahwa kerja sama IJEPA ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi komprehensif yang memiliki cakupan lebih luas dari hanya perdagangan barang. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai IJEPA, implementasi kerja sama Indonesia – Jepang melalui IJEPA dalam bidang ketenagakerjaan serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses pengimplementasian tersebut. Hal inilah yang mungkin dapat membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Merujuk pada bagian latar belakang tulisan, maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian yang akan berpusat pada implementasi kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang melalui IJEPA serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasi kerja sama tersebut selama tahun 2008-2023.. Periode 2008 dipilih karena pada tahun tersebut IJEPA pertama kali diimplementasikan dan tahun 2023 menjadi tahun terakhir penulis menemukan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dan Jepang melalui IJEPA dalam bidang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasi kerja sama ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang didasari oleh rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dan Jepang melalui IJEPA dalam bidang ketenagakerjaan
2. Mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasi kerja sama tersebut.

Berikutnya merupakan kegunaan dari penelitian ini yaitu;

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa/i program studi hubungan internasional mengenai bagaimana dampak kerja sama IJEPA terhadap perekonomian Indonesia serta bagaimana relevansi kerja sama IJEPA ini terhadap perekonomian di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa/i yang ingin meneliti hal serupa atau berhubungan kerja sama antar negara, perdagangan Internasional, dan sebagainya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan tiga konsep teori yang akan digunakan dalam menjawab hal-hal yang menjadi fokus dan masalah penelitian. Adapun ketiga konsep teori tersebut adalah kerja sama bilateral, kerja sama ekonomi (*economic partnership*) dan mobilitas tenaga kerja. Pada bagian ini penulis akan berusaha untuk menjelaskan maksud dari kedua konsep ini.

1. Kerja Sama Bilateral

Negara merupakan salah satu objek penelitian utama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Kualitas dan kekuatan dari sebuah negara dapat diukur melalui berbagai

macam faktor salah satunya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat dari negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka negara akan melakukan segala upaya demi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan menjalin hubungan kerja sama terhadap negara lain. Sama halnya manusia sebagai individu, negara juga tidak dapat berdiri hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri (Avivi dan Siagian, 2020).

Kondisi tidak mempunya satu pihak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dianggap menjadi faktor yang menyebabkan satu pihak tadi membutuhkan adanya bantuan pihak lain dalam penyelesaiannya. Bantuan yang diberikan juga pada akhirnya akan didasari dengan kaitan proses pemenuhan kepentingan masing-masing aktor. Berdasarkan munculnya anggapan seperti ini, Holsti kembali memaparkan pendapatnya mengenai alasan dari terbentuknya sebuah kerja sama (Holsti, 1988), yaitu:

1. Adanya ancaman bersama (*common threats*) atau permasalahan yang sama (*common problems*) dapat menjadi dasar dari terbentuknya sebuah kerja sama

2. Adanya pengurangan biaya (*reducing costs*) dan peningkatan efisiensi dalam perdagangan (*increase efficiency*)
3. Dengan bekerja sama pemerintah berharap dapat mengurangi angka kemiskinan dengan adanya biaya negatif akan tindakan mereka sebagai imbas untuk negara lain
4. Adanya rasa timbal balik yang timbul sebagai dasar dari terbentuknya sebuah hubungan kerja sama

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara melakukan kerja sama bilateral disebabkan oleh adanya tujuan yang sama sehingga menyebabkan terbentuknya korelasi yang intens yang kemudian mendorong pada adanya implementasi kerja sama jangka panjang.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga turut menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain. Tercatat sampai 6 Januari 2023 Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara yang dapat dibagi ke dalam 8 kawasan yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan

Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Tengah dan Timur. (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Konsep kerja sama bilateral ini digunakan oleh penulis untuk menggambarkan bentuk hubungan kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang serta alasan dan tujuan dari terbentuknya kerja sama tersebut.

2. Kerja Sama Ekonomi

Dalam kehidupan internasional, negara merupakan salah satu aktor utama yang menjadi penggerak di dalamnya. Sama seperti manusia, negara juga memiliki sifat ketergantungan satu sama lain agar dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara agar dapat bertahan dalam hirarki dunia adalah dengan melakukan kerja sama antar negara.

Melihat bagaimana bertambah mudahnya aktivitas perekonomian Internasional dapat berjalan yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi di era sekarang membuat negara-negara sebagai aktor penggerak ekonomi berlomba untuk memanfaatkan fenomena tersebut untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang dimilikinya. Terlebih jika mengacu pada bagaimana pentingnya aspek ekonomi itu sendiri bagi sebuah negara untuk menunjukkan kedaulatan dan eksistensinya dalam hirarki internasional.

Namun apabila terjun langsung ke lapangan, maka dapat terlihat fakta bahwa melakukan kegiatan perekonomian dalam pasar internasional bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa hal yang dapat memberatkan negara sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya seperti permasalahan tarif pajak yang tinggi dan sebagainya. Melihat segala permasalahan ini, negara pun memutuskan untuk saling bermitra dalam melakukan kegiatan ekonomi (Suryanto dan Kurniati, 2022).

Tujuan dari terjalinnya kerja sama ekonomi inipun sangat jelas, yaitu bagaimana negara yang bermitra saling memberi kemudahan dan menghapus segala hal yang sekiranya dapat menghambat dalam bagaimana negara melakukan aktivitas perekonomian salah satunya yang paling umum seperti perdagangan terhadap satu sama lain agar masing-masing negara dapat meningkatkan kualitas ekonomi negaranya secara bersama.

Selain melalui liberalisasi perdagangan, hubungan kerja sama ekonomi antar negara juga dapat diwujudkan dengan adanya pemberian bentuk fasilitas yang akan memudahkan perdagangan, pemberian investasi, bahkan negara yang bermitra juga dapat mempromosikan negara mitranya dalam lingkup dunia internasional. Semua hal ini dilakukan oleh

negara dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomian negara masing-masing serta memperoleh segala kemudahan dalam melakukan aktivitas perekonomian di masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa kerja sama ekonomi merupakan hubungan yang terjalin antar aktor penggerak ekonomi dalam hal ini adalah negara. Dimana negara memutuskan untuk bermitra dalam melakukan aktivitas perekonomiannya baik itu perdagangan, investasi dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh segala keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing negara demi memajukan perekonomian, selain itu dengan adanya kerja sama ekonomi ini maka hubungan antar negara juga akan terjalin semakin erat.

Kerja sama ekonomi pun dapat terbagi berdasarkan jumlah mitra dan aktor mitra seperti adanya kerja sama bilateral yang terbentuk oleh 2 negara yang bermitra, multilateral yang terdiri dari 3 negara atau lebih serta regional dimana negara bermitra dengan negara lain yang memiliki kedekatan secara regional seperti negara anggota ASEAN.

Sifat dari kerja sama ekonomi pun turut mengalami perubahan seiring dengan semakin meluasnya cakupan dari aktivitas perekonomian yang dapat dilakukan oleh negara.

Kerja sama ekonomi terdahulu lebih berfokus pada bagaimana mengatur dan membuat perdagangan internasional lebih mudah dilakukan dan menguntungkan negara dengan mengatur bermacam hal seperti pembebasan tarif dan sebagainya. Melalui kemudahan akibat perkembangan teknologi dan informasi, kerja sama internasional pun mengalami perluasan fokus yang mencakup tidak hanya perdagangan tetapi juga aktivitas penanaman investasi, peningkatan daya saing, akses pasar, perkembangan dan penyediaan fasilitas perdagangan, perdagangan jasa serta perpindahan ketenagakerjaan. Oleh karena hal inilah maka kerja sama ekonomi secara komprehensif disebut sebagai kerja sama yang lebih modern dan luas. (Sekretariat Kabinet RI, 2023)

Adanya perluasan fokus ini membuat negara sebagai pelaku kegiatan ekonomi memiliki berbagai sumber daya atau usaha lain yang dapat dilakukan untuk tetap ikut bersaing dalam perdagangan Internasional seperti dengan melakukan investasi pada negara mitra atau memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dan melakukan perdagangan jasa serta perpindahan ketenagakerjaan. Dimana dalam penelitian ini akan berfokus pada bidang perpindahan ketenagakerjaan Indonesia ke Jepang dalam kerja sama IJEP.

Digunakannya konsep kerja sama ekonomi dalam tulisan ini sebagai penegasan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Jepang ini merupakan perjanjian kerja sama ekonomi yang bersifat komprehensif atau lebih luas dibanding dengan bentuk kerja sama ekonomi tradisional.

3. Mobilitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja, berdasar pada Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai setiap individu yang mampu atau sedang melakukan sebuah pekerjaan, yang kemudian akan menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja.

Migrasi tenaga kerja atau perpindahan tenaga kerja dari satu wilayah menuju wilayah lainnya merupakan hal yang umum terjadi dalam satu negara. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perpindahan penduduk ini seperti adanya rasa kurang puas terhadap kehidupan yang dijalani dalam wilayah sebelumnya, adanya rasa tidak aman untuk hidup dalam wilayah sebelumnya, dan yang paling umum adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperoleh kesejahteraan.

Perpindahan tenaga kerja kerap terjadi pada negara yang memiliki populitas penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persaingan dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia sehingga penduduk terpaksa untuk bekerja pada negara lain contohnya Indonesia. Negara Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebanyak 269,603 juta jiwa. Dimana banyaknya penduduk yang menjadi tenaga kerja asing sejumlah 1.804,743 juta jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Negara yang sering menjadi tujuan dari berpindahnya tenaga kerjaini ialah negara-negara maju dan berkembang, dengan kebutuhan akan tenaga kerja asing yang tinggi contohnya seperti Jepang. Apalagi jika melihat fenomena penurunan jumlah penduduk yang terus dialami setiap tahunnya oleh Jepang, bahkan pada tahun 2022 tercatat adanya penurunan jumlah penduduk secara drastis sebesar 0,65 persen lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah penduduk asing yang hidup di Jepang sebesar 10,7 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Negara Indonesia pun menjadi salah satu negara yang kerap mengirimkan jasa tenaganya ke Jepang. (CNN

Indonesia, 2023).

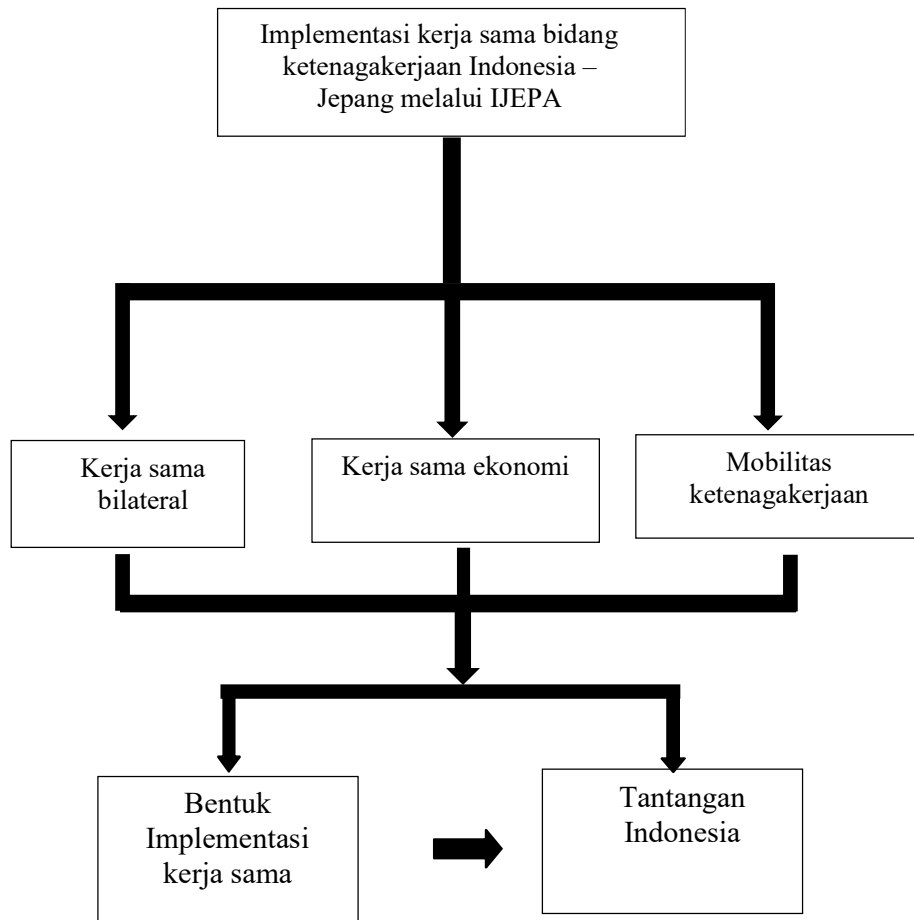
Namun agar dapat bekerja di negara lain seperti Jepang bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja asing untuk bisa bekerja di negara lain. Para penduduk yang akan menjadi tenaga kerja asing akan mendapatkan beberapa tes dan pelatihan sebelum akhirnya dikirim menuju negara lain. Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut, Indonesia telah membuka beberapa badan atau organisasi yang memberikan pelatihan pada penduduk di usia produktif yang hendak menjadi tenaga kerja asing salah satunya Technopark Ganesha Sukowati.

Badan pelatihan ini penulis angkat sebagai contoh karena badan initelah dipercaya langsung oleh kementerian tenaga kerja sebagai pusat pemberian pelatihan bahasa asing untuk calon tenaga kerja asing. Disebutkan bahwa badan pelatihan ini telah berhasil memberangkatkan sebanyak 12 dari 20 peserta pelatihan ke Jepang pada tahun 2014 (Harini dan Damayanti, 2015)

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan sarana dan prasarana. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pendidikan di

Indonesia terus mengalami kemajuan sejak 20 tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan adanya program perluasan sekolah, peningkatan akses pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, pemberian beasiswa, serta penerapan program belajar mandiri atau merdeka belajar. (Kementerian Keuangan RI, n.d.).

Melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Indonesia telah berupaya sedemikian rupa guna memajukan sumber daya manusianya agar dapat bersaing dalam dunia internasional. Penulis menggunakan konsep teori ini untuk mengetahui bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan dengan Jepang dalam lingkup IJEPA.



Bagan Alur Berpikir 1

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif, dimana akan dijelaskan bagaimana implementasi kerja sama Indonesia – Jepang dalam bidang ketenagakerjaan melalui IJEPA serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengimplementasian tersebut. Tipe penelitian kualitatif dalam studi ilmu hubungan internasional dilakukan dengan mempelajari fenomena dan aktor serta memahami proses dan fenomena yang terjadi dalam dunia Internasional.

2. Jenis dan Data Sumber

Data sekunder merupakan jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Data sekunder sendiri diperoleh melalui beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun literatur yang digunakan adalah berupa jurnal, portal berita online, serta beberapa situs resmi yang sesuai dengan topik penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dengan mencari judul atau tema bacaan yang sesuai dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, dimana data yang diperoleh akan disesuaikan dengan literatur yang diperoleh berkaitan dengan topik penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Berikut uraian sistematika penulisan penelitian ini, antara lain;

1. **BAB 1 Pendahuluan** mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. **BAB 2 Tinjauan Pustaka** memuat deskripsi teoritis terkait variabel yang akan diteliti dengan mengkaji argumen dan tinjauan teori yang relevan sebagai landasan penelitian.
3. **Bab 3 Gambaran Umum** memuat gambaran umum variabel-variabel yang akan diteliti dan data-data yang mendukung untuk menjawab rumusan masalah.
4. **BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** berisikan hasil penelitian yang sebelumnya telah melalui proses pengujian hipotesis dengan berlandaskan data- data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab

ini akan dibahas terkait bentuk implementasi kerja sama Indonesia – Jepang dalam bidang ketenagakerjaan melalui IJEPA dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses pengimplementasian kerja sama tersebut.

5. **BAB 5 Kesimpulan** berisi rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan mencakup mencapai hipotesis akhir dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah diajukan dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerja Sama Bilateral

Keutuhan dari sebuah negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekuatan keamanan dan perekonomian. Dalam lingkup perekonomian, kesejahteraan rakyat pun menjadi salah satu isu yang dianggap sangat penting bagi negara, dimana isu ini kemudian akan diangkat menjadi sebuah kepentingan nasional. Negara kemudian akan berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Berbagai jalan akan dilakukan oleh negara sebagai usaha mereka dalam memenuhi kepentingan nasional ini, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan negara lain (Avivi & Siagian, 2020).

Dalam kehidupan sosial, manusia dikenal sebagai makhluk sosialis dimana mereka dinilai tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Begitu juga dengan negara, sebagai aktor dalam lingkup dunia internasional mereka tidak bisa berdiri sendiri dan hanya berpangku pada sumber daya yang dimiliki. Negara membutuhkan bantuan negara lain agar tetap bisa mempertahankan eksistensi mereka dalam hirarki dunia internasional. Dengan alasan inilah negara di dunia akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama.

Dalam lingkup dunia internasional, negara juga turut saling menjalin kerja sama. Holsti (1988) juga menyebutkan beberapa pandangan untuk mendefinisikan proses dalam kerja sama antar negara ini, yaitu:

1. Terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan, nilai atau tujuan antar negara yang saling bertemu dan sekiranya dapat menghasilkan sesuatu
2. Berupa pandangan atau harapan dari satu negara mengenai kebijakan dari negara lainnya yang dianggap dapat membantu negara tersebut dalam memenuhi kepentingan nasionalnya
3. Sebuah bentuk keputusan dan persetujuan dari masing-masing negara untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan
4. Merupakan bentuk aturan baik secara resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk menjalankan sebuah persetujuan
5. Bentuk transaksi antar negara yang bertujuan untuk memenuhi persetujuan yang ada

Melalui pemaparan mengenai definisi pandangan terkait tentang kerja sama yang telah dikemukakan oleh Holsti ini, dapat diketahui bahwa kerja sama merupakan sebuah bentuk hubungan, dimana di dalamnya pihak yang saling berhubungan akan mengajukan sebuah

alternatif solusi, diskusi dan pembicaraan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Secara bersama, pihak yang saling berhubungan akan mencari dan mengemukakan berbagai bukti teknis yang nantinya akan digunakan untuk menopang sebuah pemecahan masalah tertentu, lalu kemudian mereka akan mengakhiri perundingan dengan menghasilkan beberapa perjanjian agar terjalin sikap saling mengerti satu sama lain sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan kepuasan yang sama (Holsti, 1988).

Kondisi tidak mempunya satu pihak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dianggap menjadi faktor yang menyebabkan satu pihak tadi membutuhkan adanya bantuan pihak lain dalam penyelesaiannya. Bantuan yang diberikan juga pada akhirnya akan didasari dengan kaitan proses pemenuhan kepentingan masing-masing aktor. Berdasarkan munculnya anggapan seperti ini, Holsti kembali memaparkan pendapatnya mengenai alasan dari terbentuknya sebuah kerja sama (Holsti, 1988), yaitu:

1. Adanya ancaman bersama (*common threats*) atau permasalahan yang sama (*common problems*) dapat menjadi dasar dari terbentuknya sebuah kerja sama
2. Adanya pengurangan biaya (*reducing costs*) dan peningkatan efisiensi dalam perdagangan (*increase efficiency*)
3. Dengan bekerja sama pemerintah berharap dapat mengurangi

angka kemiskinan dengan adanya biaya negatif akan tindakan mereka sebagai imbas untuk negara lain

4. Adanya rasa timbal balik yang timbul sebagai dasar dari terbentuknya sebuah hubungan kerja sama

Aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh negara dalam lingkup internasional disebut sebagai kerja sama internasional. Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai bentuk usaha sebuah negara dalam memanfaatkan negara atau pihak lain demi mencapai kepentingan nasionalnya dan mendapat kesejahteraan bersama (Nugraha, 2018).

Pada dasarnya, kondisi interdependensi yang ada dalam negara merupakan faktor utama terjadinya kerja sama internasional ini. Permasalahan seperti isu ekonomi yang meliputi keseimbangan dan hambatan perdagangan, nilai tukar, aset cadangan, kebijakan fiskal, serta ekonomi pasar kapitalis telah menjadi isu yang secara umum dianggap sebagai titik interdependensi dari negara.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan negara mengalami perubahan dan tidak lagi hanya berpusat pada isu ekonomi. Terdapat beberapa isu interdependensi yang lebih kompleks seperti permasalahan lingkungan, kesehatan, dan populasi atau demografi. Hal inilah yang membuat Keohane dan Nye memperkenalkan istilah “interdependensi kompleks” (Sterling-Folker, 2013).

Keohane dan Joseph Nye juga menambahkan bahwa jika terdapat tingkat interdependensi yang tinggi, maka negara akan bekerja sama dan membentuk lembaga-lembaga internasional untuk menghadapi masalah-masalah tersebut secara bersama. Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan turut memajukan kerja sama internasional dengan mengurangi biaya dan memberikan informasi. Adapun lembaga-lembaga yang disebut tadi dapat berupa organisasi internasional yang formal atau dapat juga berupa serangkaian persetujuan non-formal namun dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan aktivitas atau menghadapi isu secara bersama (Jackson & Sorensen, 2005)

Terdapat penjelasan dari Keohane yang juga berkaitan mengenai bagaimana kerja sama internasional ini dapat terjadi. Keohane menjelaskan bahwa kerja sama internasional dimulai ketika para aktor atau yang dalam hal ini adalah negara, berada dalam situasi di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh negara untuk mencapai kepentingannya dianggap sebagai penghalang oleh negara lain. Dimana negara tadi tidak memerhatikan kepentingan dari negara lainnya dalam mengeluarkan kebijakannya. Oleh karena itu kerja sama internasional kemudian muncul dan terbentuk, sebagai bentuk penyesuaian perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi oleh negara lain melalui suatu koordinasi kebijakan (Keohane, 1984).

Milner kemudian menambahkan bahwa terdapat konsepsi mengenai kerja sama internasional ini, dimana dalam konsepsi ini terdapat dua elemen yang dianggap penting. Konsepsi pertama mengasumsikan bahwa setiap perilaku dari negara sebagai aktor diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan ini tidaklah harus sama bagi setiap aktor yang terlibat. Namun setiap aktor menganggap bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan rasional bagi semua pihak. Konsepsi kedua menyatakan bahwa kerja sama yang dijalankan akan menghasilkan keuntungan atau pencapaian bagi para aktor. Keuntungan yang diperoleh oleh setiap aktor juga tidak harus selalu sama, namun harus memiliki sifat timbal balik (Milner, 1992).

Dalam menjalankan kerja sama pun, negara sebagai aktor diharuskan untuk memenuhi setidaknya dua persyaratan. Adapun persyaratan tersebut yaitu pertama, negara yang saling menjalin hubungan kerja sama harus memiliki sifat menghargai setiap kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terlibat. Dengan adanya penghargaan ini, maka diharapkan kerja sama dapat berjalan aman dan pihak yang saling bekerja sama dapat mencapai kepentingannya masing-masing. Syarat kedua, setiap permasalahan yang timbul harus dibahas dan secara bersama mendiskusikan mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan karena untuk mencapai sebuah keputusan bersama, maka komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang perlu dilakukan. Frekuensi dari

komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dibanding dengan komitmen (Sjamsu Summar & Riswandi, 1995).

Kerja sama secara lintas wilayah ini kemudian dapat dibagi berdasarkan aktor yang terlibat yaitu kerja sama bilateral dan regional. Kerja sama bilateral sendiri merupakan hubungan kerja sama yang terjalin diantara dua aktor internasional sedangkan kerja sama regional merupakan hubungan kerja sama yang melibatkan beberapa aktor, di mana aktor-aktor atau negara ini berada dalam satu wilayah regional secara geografis dengan jarak yang relatif berdekatan satu sama lain contohnya ASEAN.

Kerja sama bilateral dalam kamus politik internasional juga dapat diartikan sebagai hubungan yang saling mempengaruhi atau terdapat hubungan timbal balik yang terjadi di antara dua pihak atau dua negara (Krisna, 1993). Disebutkan juga bahwa dalam kegiatan hubungan kerja sama bilateral, biasanya terdapat tiga motif yang menentukan proses kerja sama ini yaitu:

1. Untuk memelihara kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Bagi Indonesia sendiri, terhitung hingga tahun 2023 telah terdapat sebanyak 162 negara serta satu wilayah khusus atau *non-government teritory* yang menjadi mitra dalam hubungan kerja sama bilateral. Adapun negara-negara ini terbagi dalam 8 kawasan yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Tengah dan Timur. Dalam menjalankan kerja sama bilateral ini, Indonesia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang saling menghormati, tidak mencampuri urusan internal dari negara lain, menolak adanya penggunaan segala bentuk kekerasan, serta berusaha untuk mengutamakan konsultasi dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Terdapat juga contoh hubungan kerja sama bilateral yang didasari oleh adanya kesamaan ras, etnis dan nilai. Biasanya hubungan ini dilakukan oleh negara yang memiliki budaya yang sama sehingga mereka merasakan adanya keperluan untuk saling menjalin kerja sama karena adanya kesamaan dari budaya yang dimiliki tersebut. Lebih jelasnya, bentuk hubungan ini dapat dilihat melalui diplomasi antara Kanada dan Prancis, yang di mana di Kanada terdapat sebuah kota yang di dalamnya terdapat bentuk kebudayaan Prancis yang sangat kental yaitu di kota Quebec. Hal ini sama saja dengan situasi di mana sebuah ras atau suku akan memiliki hubungan yang dekat secara natural karena adanya persamaan yang dimiliki (Rana, 2020).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka salah satu bentuk kerja sama bilateral yang dimaksud adalah kerja sama IJEPA. Di mana kerja sama antara Indonesia dengan Jepang ini terbentuk karena adanya tujuan nasional yang sama, yaitu ingin memperluas jangkauan pasar, dapat memudahkan aktivitas perekonomian, kerja sama ketenagakerjaan dan pada akhirnya secara bersama memperoleh keuntungan yang dapat mensejahterakan negara.

B. Konsep Kerja Sama Ekonomi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam lingkup dunia internasional, sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Negara dalam usahanya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri, akan menempuh jalan apapun salah satunya dengan melakukan kerja sama. Terlebih, kedaulatan dari sebuah negara sangat ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi atau lebih tepatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Di mana negara tidak dapat berpangku diri dan hanya mengandalkan sumber dayanya untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perekonomian negara-negara di dunia mengalami integrasi yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Globalisasi menyebabkan arus proses perpindahan informasi, barang serta jasa dari satu negara menuju negara lain menjadi lebih mudah. Adanya fenomena ini secara tidak langsung telah

mendorong aktivitas perdagangan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Jesica & Kurnia, 2019).

Aktivitas perdagangan dapat menjadi keuntungan bagi negara dengan memberikan peluang bagi mereka untuk dapat mengekspor berbagai hasil produksinya menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh negara produsen. Selain itu, negara juga dapat mengimpor berbagai hasil produksi negara lain yang bahan produksinya tergolong cukup langka. Sebuah negara akan melakukan kegiatan ekspor ketika hasil produksi dalam negeri telah melebihi tingkat konsumsi dalam negeri, sehingga produsen dapat memiliki peluang untuk memasarkan hasil produksinya ke pasar luar (Jesica & Kurnia, 2019)

Dominick Salvatore (1997) kemudian menjelaskan bahwa dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekspor. Di mana faktor-faktor ini dapat dilihat melalui sisi permintaan dan penawaran. Salvatore juga menambahkan bahwa model perdagangan standar setidaknya harus dilandasi oleh empat hubungan inti, yaitu:

1. Hubungan antara batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif
2. Hubungan antara harga-harga relatif dengan tingkat permintaan

3. Penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dengan permintaan relatif dunia
4. Pengaruh nilai tukar perdagangan (*term of trade*), yaitu harga ekspor dari satu negara dibagi dengan harga impornya terhadap kesejahteraan suatu negara

Perdagangan internasional juga dinilai dapat memberikan beberapa manfaat bagi suatu negara dengan menghasilkan produk yang memiliki kualitas unggul serta dapat mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri. Di mana investasi ini dapat menjadi faktor utama yang bisa mendorong perkembangan industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas (Afin, Yulistiono & Oktarani, 2008).

Adanya aktivitas perdagangan internasional juga dapat memperbesar kemungkinan suatu negara untuk mendapatkan pasar dengan skala yang lebih luas. Namun hal ini memiliki efek timbal balik, di mana dengan adanya pasar yang lebih luas karena perdagangan internasional, maka dapat juga memberikan peluang untuk masuknya produk luar negeri yang lebih murah dan berkualitas ke pasar domestik (Ardiyanti, 2015).

Fenomena perkembangan dan pergeseran dari perekonomian dunia yang mengarah pada terbukanya pasar global akhirnya memberikan tekanan persaingan produk antar negara untuk dapat mempertahankan

dan saling meningkatkan daya saingnya masing-masing. Namun pada kenyataannya, menjalankan perdagangan internasional ini bukanlah hal yang mudah bagi negara. Terdapat beberapa permasalahan yang dianggap dapat menghambat negara untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan perdagangan internasional seperti adanya pengenaan tarif bea dan pajak barang.

Pengenaan tarif bea dan pajak barang sebenarnya merupakan langkah dari negara untuk dapat membatasi masuknya barang dan mengatur berjalannya perdagangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya batasan-batasan ini akan menjadi hambatan bagi negara atau pelaku perdagangan bahkan sampai ke tahap merugikan (Wati, dkk. 2023).

Oleh karena itu, negara secara agresif memutuskan untuk membangun beberapa strategi berupa diplomasi serta mengadopsi beberapa kebijakan yang berwawasan ke luar (*outward looking policy*). Salah satunya melalui perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang diterapkan baik secara bilateral maupun multilateral.

Bagi negara, dengan adanya kerja sama perjanjian perdagangan bebas ini maka dapat memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi, dengan berupa terbukanya akses pasar barang dan jasa yang disebabkan oleh adanya penurunan tarif bea masuk dan *non-tariff measures*

(NTMs) serta dapat memudahkan masuknya investasi asing. Adanya liberalisasi dalam perdagangan juga dapat memberikan dorongan peningkatan kapasitas, efisiensi dalam produksi, partisipasi dalam *Global Value Chain (GVC)*, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan pertumbuhan produktivitas yang nantinya dapat memberikan kontribusi positif pada sisi penawaran yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara (OECD, 2011).

Tidak hanya memberi dampak dalam aspek perekonomian, adanya perdagangan bebas juga dapat mempengaruhi hubungan diplomasi suatu negara dengan negara mitranya. Perdagangan bebas dapat mendorong terjadinya kerja sama secara internasional melalui proses pembentukan kemitraan dagang antar negara atau biasa juga disebut sebagai integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini merujuk pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang akan menurunkan atau menghilangkan hal-hal yang menjadi hambatan dalam perdagangan bagi negara-negara yang saling menyetujui untuk membentuk suatu integrasi ekonomi terbatas (Salvatore, 1997).

Namun di satu sisi, beberapa penelitian seperti yang disampaikan oleh Santos-Paulino & Thirwall (2004) serta Parikh (2004) menyebutkan bahwa liberalisasi perdagangan justru dapat memberikan dampak negatif terhadap defisit neraca perdagangan suatu negara yang disebabkan oleh adanya peningkatan impor yang lebih tinggi dibanding

peningkatan ekspor. Terjadinya defisit neraca perdagangan akan memberikan tekanan bagi neraca pembayaran sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro yang selanjutnya akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi.

Terdapat juga resiko perbedaan distribusi keuntungan dan kerugian yang tidak merata baik dalam lintas sektor, lintas kelompok tertentu maupun antar mitra FTA. Hal ini menyebabkan dalam setiap perjanjian perdagangan bebas, akan terdapat pihak yang lebih diuntungkan dibanding dengan mitranya. Peristiwa ini dapat terjadi karena liberalisasi perdagangan yang akan memberikan manfaat lebih banyak kepada pihak yang memiliki kesiapan dan keahlian lebih dalam proses negosiasi. Di mana negara-negara yang memiliki keunggulan ini biasanya terdiri dari negara-negara maju. Beberapa ahli ekonomi juga berpandangan bahwa pada jangka pendek, liberalisasi perdagangan akan merugikan negara dengan tingkat ekonomi lebih rendah jika dibandingkan dengan negara mitranya (Winters, Mcculloh & McKay, 2004).

Dalam praktiknya, perjanjian dagang ini kemudian muncul dalam beberapa bentuk model yang disesuaikan dengan tujuan dan dibedakan berdasarkan cakupan fokus yang ada dalam perjanjian-perjanjian ini. *Preferential Trading Arrangements* (PTA) merupakan bentuk perjanjian dagang internasional yang memiliki jumlah keanggotaan

yang terbatas. PTA biasanya dilakukan ketika perjanjian dagang dalam skala bilateral dan multilateral dirasa tidak dapat memberi keuntungan seperti yang diharapkan. Adapun tujuan dari dibentuknya perjanjian model ini yaitu untuk mengurangi tarif produk tertentu yang berasal dari negara-negara anggota PTA. Adapun manfaat dari diberlakukannya PTA ini adalah:

1. Dapat mengurangi biaya ekspor dan impor untuk produk tertentu yang telah disepakati.
2. Dapat meningkatkan aktivitas perdagangan antar negara mitra PTA.
3. Dapat menciptakan peluang pasar baru baik antar negara mitra maupun di luar negara mitra.

Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi pembeda dari perjanjian PTA dengan perjanjian dagang lainnya dapat dilihat melalui cakupan fokus dari perjanjian ini. Di mana dalam PTA, pengurangan atau penghilangan tarif barang secara bertahap serta penciptaan keunggulan daya saing secara khusus bagi negara anggota menjadi tujuan dari perjanjian ini. Dibandingkan dengan FTA yang memiliki cakupan lebih luas karena turut meliputi aspek perdagangan barang, jasa serta investasi (Sukanto, 2023).

Selanjutnya terdapat bentuk kemitraan *Economic Partnership Agreement* (EPA). EPA merupakan bentuk perjanjian internasional yang dibentuk sebagai deregulasi berbagai peraturan dalam kegiatan penanaman modal investasi. Terdapat juga peraturan mengenai pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan dalam EPA ini. EPA dan FTA sama-sama berisi tentang pengurangan atau penghapusan tarif dalam perdagangan. Meski demikian, EPA memiliki cakupan yang lebih luas dibanding sekedar tentang pengurangan dan penghapusan tarif. Pada EPA juga dimuat beberapa ketentuan lain seperti memfasilitasi sumber daya manusia, hak kekayaan intelektual (HAKI), aturan keadilan dalam persaingan perdagangan, serta barang dan modal (Wati, dkk, 2023).

Pemberlakuan kerja sama perdagangan di bawah perjanjian EPA ini dapat membuat negara yang tergabung memperoleh tarif preferensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara yang tidak tergabung. *World Trade Organization* (WTO) telah menetapkan prinsip *Most Favored* (MFN) yang menegaskan bahwa negara-negara harus mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya ketimpangan satu sama lain.

Ketika negara telah memutuskan untuk sama-sama menjalin perjanjian EPA, maka negara-negara tersebut dapat melakukan pengurangan tarif di bawah ketentuan tarif MFN. Hal ini merupakan

salah satu manfaat bagi negara jika melakukan perjanjian EPA ini. Tarif perdagangan dalam EPA ditentukan dalam 3 golongan (Wati, dkk, 2023) yaitu:

1. Sepanjang pemberlakuan EPA, maka terdapat penurunan tarif preferensi menjadi 0%
2. Penghapusan tarif akan diberlakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu setelah pengimplementasian EPA
3. Tidak ada penurunan atau penghapusan tarif jika tarif preferensi MFN yang berlaku

Dalam perjanjian EPA, terdapat juga bentuk perjanjian dengan cakupan fokus lebih luas lagi yaitu *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Pada dasarnya, CEPA merupakan bentuk perjanjian yang memiliki rancangan yang saling terhubung seperti akses pasar, pengembangan kapasitas serta fasilitasi perdagangan dan investasi (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).

Kata “komprehensif” dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki wawasan yang luas dan melihat suatu permasalahan dari berbagai aspek sehingga dapat memahami permasalahan tersebut secara menyeluruh lalu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, CEPA disebut sebagai bentuk perjanjian perdagangan dengan ruang lingkup yang luas. Di mana dalam perjanjian ini tidak hanya mengatur permasalahan tarif,

tapi juga meliputi pengembangan kapasitas dan memberikan fasilitas yang berkaitan dengan berjalannya perdagangan serta investasi (Sekretariat Kabinet RI, 2023)

Tidak hanya mengenai perdagangan dan investasi, dalam CEPA juga diatur bagaimana negara yang bermitra akan memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap aktivitas pergerakan tenaga kerja (*movement of natural person*). Adapun tujuan dari diaturnya berbagai hal tersebut adalah untuk menghapuskan tarif, menjaga akses pasar, memberikan kondisi yang aman bagi penyedia produk jasa, serta melindungi dan mendorong terjadinya investasi (Setkab RI, 2023).

Kerja sama IJEPA sendiri merupakan salah satu contoh bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi, yang dibuat berdasarkan prinsip *economic partnership agreement* dan bersifat komprehensif. Artinya, selain berfokus pada kemudahan menjalankan aktivitas perekonomian dan investasi, kerja sama IJEPA juga meliputi beberapa poin kerja sama yang dianggap penting bagi Indonesia dan Jepang seperti kerja sama ketenagakerjaan.

C. Konsep Mobilitas Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja dapat diartikan sebagai sebagai setiap individu yang mampu atau sedang menjalankan sebuah pekerjaan. Dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut, tenaga kerja akan

menghasilkan sebuah barang atau jasa. Pekerjaan inipun dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa individu yang dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja adalah yang berusia 15 tahun atau lebih. Simanjuntak dalam Latipah dan Inggit (2017) menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk dengan batasan umur 15 tahun yang telah atau sedang melakukan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan sembari melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga.

Simanjuntak (2001) kemudian menambahkan bahwa tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri dimaksudkan untuk penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam kelompok angkatan kerja terdapat golongan yang sedang bekerja dan golongan yang sedang menganggur sembari mencari pekerjaan.

Sementara itu, yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja ialah golongan yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga, serta golongan-golongan lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini berpotensi untuk

sewaktu-waktu menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh karena itu, kelompok ini sering juga disebut dengan kelompok angkatan kerja potensial.

Tenaga kerja disebut memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dibarengi dengan infrastruktur dan pemerintahan yang baik, tenaga kerja dapat menjadi kunci yang bisa mempengaruhi naik-turunnya daya saing perekonomian (World Bank, 2010a; OECD, 2015; APO, 2015). Terdapat beberapa studi empiris seperti yang dilakukan oleh Uzik dan Vokorosova (2007) serta Emsina (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara daya saing tenaga kerja dengan daya saing perekonomian. Dimana semakin tinggi tingkat daya saing tenaga kerja suatu negara maka akan semakin tinggi juga daya saing perekonomiannya, begitu juga sebaliknya.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, terdapat salah satu fenomena yang secara alami terjadi dalam satu wilayah yaitu migrasi penduduk tenaga kerja. Secara sederhana, migrasi ini terjadi oleh beberapa faktor seperti jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di suatu wilayah sehingga menyebabkan berkurangnya lahan pekerjaan dan terjadinya penurunan atau kurangnya angka pertumbuhan penduduk yang menyebabkan suatu wilayah harus mencari dan menerima tenaga kerja asing.

Pada umumnya, migrasi dalam istilah demografi sering disebut dengan *population mobility* atau *teritorial mobility* yang biasanya diartikan sebagai sebuah gerak spasial, fisik serta geografis. Baik itu berupa gerak permanen maupun non-permanen. Migrasi dapat disebut sebagai gerak penduduk permanen, sedangkan dimensi gerak penduduk yang non-permanen terdiri dari sirkulasi dan komutasi.

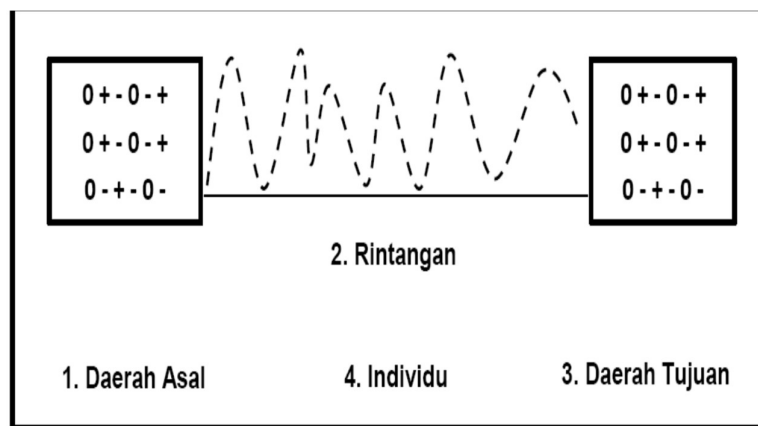
Secara jelas, sirkulasi merupakan pergerakan penduduk non-permanen, dimana penduduk yang berpindah tidak menetap dan hanya singgah sementara. Lalu komutasi merupakan mobilitas penduduk dimana mereka bergerak secara pergi-pulang tanpa menginap atau menetap di wilayah tersebut. Istilah migrasi diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perpindahan dan menetap secara permanen atau dalam jangka waktu minimal tertentu di suatu wilayah dengan hitungan jarak minimal tertentu, atau berpindah dari satu wilayah geografis baik berbeda negara maupun dalam satu negara yang sama (Haryono, 2017).

Berdasarkan penjelasan Everett S. Lee dalam Mantra (2015), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya volume migrasi dalam suatu wilayah. Adapun Lee menjelaskan faktor-faktor tersebut ialah;

1. Faktor positif (+), yaitu faktor yang memberi keuntungan apabila seseorang memilih untuk berpindah tempat dan menetap dalam wilayah tersebut.

2. Faktor negatif (-), faktor yang dapat memberi kerugian jika seseorang menetap di wilayah tersebut. Oleh karena itu mereka akan memilih untuk berpindah tempat karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi
3. Faktor netral (0), yaitu faktor yang tidak berkaitan dengan keinginan seseorang untuk memilih menetap atau berpindah tempat.

Gambar 1. Faktor-faktor determinasi penduduk menurut Everett S. Lee



(Sumber; Mantra 2015)

Disebutkan juga bahwa pelaku migrasi atau migran memiliki beberapa karakteristik (Wijaya & Syairozi, 2020) seperti;

- 1) Bersifat selektif, yang berarti migran akan berpindah sesuai dengan motif dan keinginan atau kepentingan masing-masing.
- 2) Lebih tertarik untuk berpindah menuju wilayah yang dapat memberi keuntungan bagi mereka.

- 3) Tidak akan menjadikan wilayah yang dirasa hanya akan memberi kerugian sebagai tujuan berpindah.
- 4) Sifat selektif yang dimiliki cenderung didasari oleh faktor positif dan negatif suatu wilayah.
- 5) Keputusan yang diambil biasanya setingkat dengan rintangan yang menghambat.
- 6) Keputusan untuk bermigrasi cenderung berdasar pada perkembangan hidup (*life cycle*).
- 7) Biasanya terdapat persamaan ciri-ciri antara penduduk lokal dengan migran.

Aktivitas perpindahan penduduk atau migrasi merupakan fenomena yang terjadi sejak jaman dahulu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, globalisasi juga turut mempengaruhi kebiasaan dari proses perpindahan penduduk ini. Dimana pada awalnya penduduk hanya bermigrasi dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Akibat globalisasi, muncullah bentuk migrasi yang berbeda dari sebelumnya, baik dari jarak, motif, skala dan akibat yang ditimbulkan.

Adanya fenomena globalisasi memunculkan perasaan terhubung antar masyarakat yang satu dengan yang lain karena semakin kaburnya batasan informasi dan jarak. Globalisasi yang dibarengi dengan kemajuan serta modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghilangkan batasan-batasan ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan

mudahnya setiap individu untuk melakukan aktivitas dan perpindahan. Menghilangnya batasan-batasan inipun memudahkan masyarakat untuk melakukan migrasi secara lintas negara (Haryono, 2017). Migrasi dalam skala internasional sendiri biasanya terjadi karena adanya keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Selain itu, adanya perbedaan tingkat pendapatan pekerja di dalam dan di luar negeri juga sering menjadi penyebab dilakukannya migrasi internasional (Hatton & Williamson, 2002).

Aktivitas perpindahan tenaga kerja asal Indonesia sebagai bentuk pemenuhan nilai kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam perjanjian IJEPA merupakan bentuk dari mobilitas ketenagakerjaan. Adanya tenaga kerja asal Indonesia yang masuk ke Jepang disebabkan oleh permasalahan demografi yang sedang dialami oleh Jepang, yang mengharuskan mereka untuk mengimpor tenaga kerja asing untuk mengisi kekosongan tenaga kerja.

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dilampirkan beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Di mana penelitian-penelitian yang dipilih merupakan bentuk penelitian yang sekiranya serupa atau memiliki sejumlah kemiripan secara umum dengan penelitian yang akan ditulis kali ini. Pemaparan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk dapat melihat dan mencari tahu hal apa saja yang

menjadi pembeda antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis kali ini.

Penelitian pertama yaitu ditulis oleh Septika Tri Ardiyanti yang diterbitkan pada tahun 2015 dengan judul “Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral”. Dalam tulisan ini peneliti lebih banyak membahas dampak dari kerja sama IJEPA dengan melihat melalui aspek kegiatan perdagangan barang atau *trading in goods* secara bilateral. Penelitian ini berfokus dalam mencari tahu mengenai efektivitas dari IJEPA terhadap kegiatan perdagangan Indonesia.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *counterfactual* atau melihat suatu kondisi berdasarkan dari situasi yang sebenarnya tidak terjadi. Berkaitan dengan penggunaan metode tersebut, maka penulis dalam penelitian ini berusaha melakukan peramalan terhadap data kinerja perdagangan sebelum adanya pemberlakuan FTA yang kemudian dibandingkan dengan data setelah penerapan FTA.

Peneliti selanjutnya melakukan pembuktian secara matematis dengan menggunakan data-data sebelum dan sesudah penerapan FTA. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya dampak positif dari penerapan IJEPA secara signifikan terhadap kegiatan ekspor non migas Indonesia ke Jepang (Ardiyanti, 2015).

Adapun penelitian kedua merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada contoh kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang yaitu penelitian dari Shobichatul Aminah, Wardoyo & Pangastoeti (2018) yang berjudul “Pengiriman Tenaga Perawat dan Careworker Indonesia ke Jepang dalam Kerangka *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*”. Pada penelitian ini para peneliti memaparkan salah satu bentuk kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang melalui aktivitas pengiriman tenaga kerja kesehatan Indonesia ke Jepang.

Disebutkan juga mengenai kebutuhan Jepang terhadap tenaga kesehatan yang terus meningkat setiap tahun disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk usia tua dan berkurangnya penduduk usia produktif. Selain itu dipaparkan juga proses atau tahapan pemerintah Indonesia dalam mengirimkan tenaga kesehatannya ke Jepang serta beberapa persyaratan kualifikasi tenaga kesehatan yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang.

Penelitian ketiga Berjudul “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*” yang ditulis oleh Yusron Avivi & Siagian pada tahun 2020. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai faktor adanya kepentingan nasional antara Indonesia dan Jepang yang menjadi latar belakang terbentuknya kerja sama ini.

Oleh karena itu para peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode konsep kepentingan nasional guna mencari tahu apa saja kepentingan nasional dari kedua negara yang bekerja sama sehingga perjanjian IJEPA ini dianggap penting bagi kedua negara. Disebutkan bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang bersifat subjektif, sehingga kepentingan nasional dapat dipengaruhi dan disesuaikan berdasar kepada para aktor yang berperan dalam pemerintahan.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah ditemukannya dampak negatif dalam penerapan IJEPA yang disebabkan oleh adanya situasi yang tidak kondusif bagi Indonesia yang menjadi kendala dalam kerja sama ini. Oleh karena itu kedua negara secara terus-menerus berusaha untuk memperbaiki penerapan kerja sama IJEPA ini sehingga diharapkan perjanjian ini dapat berlangsung dengan baik dan dalam waktu yang lebih lama hingga akhirnya dapat menciptakan keuntungan bagi kedua negara tanpa adanya ketimpangan.

Dari pemaparan beberapa judul penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kerja sama ekonomi dari Indonesia dan Jepang melalui IJEPA ini. Meskipun kerja sama ketenagakerjaan tetap menjadi salah satu poin fokus dari kerja sama IJEPA tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat aspek kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang

melalui IJEP, sekaligus menjadi pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya.